

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS  
PENGEMBALIAN DANA PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN  
DI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2  
Program Studi Magister Manajemen



**Disusun oleh  
NURFIANA  
172203754**

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
STIE WIDYA WIWAHA  
YOGYAKARTA  
2019**

**TESIS**

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS  
PENGEMBALIAN DANA PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN  
DI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO**

Diajukan Oleh

**NURFIANA**

**172203754**

Tesis ini telah disetujui  
pada tanggal : .....

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak**

**Zulkifli, SE., MM**

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh Gelar Magister

Yogyakarta, September 2019

Mengetahui,  
Program Magister Manajemen  
STIE Widy a Wiwaha Yogyakarta  
Direktur

**Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, September 2019

**NURFIANA**

**STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini, yaitu kepada :

1. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha.
2. Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak selaku pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Zulkifli, SE., MM selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
6. Seluruh informan yang berkenan telah memberikan informasi kepada peneliti.
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Atas segala bantuan dan dukungan semua pihak saya mengucapkan terima kasih dan saran serta kritik yang membangun terhadap kesempurnaan penulisan ini sangat saya harapkan.

Yogyakarta, September 2019

**NURFIANA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	11
1.4 Tujuan penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Pustaka.....	13
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Penelitian.....	22
2.4 Hipotesis Penelitian.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	23
3.2 Lokasi Penelitian.....	23
3.3 Identifikasi Variabel Penelitian.....	24
3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	25
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.6 Populasi, Sampel dan Metode Penentuan Sampel.....	29
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.8 Teknik Analisis Data.....	32

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Efektivitas kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat .....	37
4.2 Analisis Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha .....	40
4.3 Hasil Penelitian .....	41
4.4 Pembahasan.....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Efektifitas .....	41
Tabel 4.2 Hasil Deskripsi.....	41
Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Olah Data Regresi.....	43
Tabel 4.4 Hasil Uji F.....	44

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian..... 22

**STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat**

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis pengaruh langsung jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha dan pengalaman mengikuti pelatihan terhadap komitmen pengembalian dana dan efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari BK DAPM Perdesaan di Kecamatan Bener. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada pengaruh yang signifikan antara jumlah pinjaman terhadap pengembalian dana bila dilihat dari signifikan lebih kecil dari 0,05. Ada pengaruh yang signifikan antara jam kerja terhadap pengembalian dana bila dilihat dari signifikan lebih kecil dari 0,05. Ada pengaruh yang signifikan antara prioritas usaha terhadap pengembalian dana bila dilihat dari signifikan lebih kecil dari 0,05. Ada pengaruh yang signifikan antara pengalaman terhadap pengembalian dana bila dilihat dari signifikan lebih kecil dari 0,05. Ada pengaruh secara signifikan antara jumlah pinjaman, antara jam kerja, prioritas usaha dan pengalaman terhadap pengembalian dana secara bersama sama.

Kata kunci: dana amanah pemberdayaan masyarakat, program simpan pinjam

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan, Pemerintah menggunakan Badan Kerjasama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (BK DAPM) sebagai salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Kegiatan yang dapat didanai melalui program ini, diutamakan pada kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin, berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan oleh masyarakat, didukung oleh sumber daya yang ada serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Salah satu jenis kegiatan BK DAPM-MP ini adalah penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan atau yang sering disebut dengan SPP. Dalam salah satu tujuan khususnya, disebutkan bahwa BK DAPM bertujuan untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Dalam salah satu prinsip dasar BK DAPM, juga disebutkan adanya kesetaraan dan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian

kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. Selain itu salah satu keluaran program dari BK DAPM ini adalah adanya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pelestarian program-program BK DAPM itu sendiri. Berdasarkan tujuan khusus, prinsip dasar dan keluaran program dari BK DAPM tersebut dapat dinyatakan bahwa keberpihakan pada perempuan merupakan salah satu nilai tambah program ini. Format baru dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan lokal yang merupakan reformasi dari sistem sebelumnya semestinya dibangun di atas tatanan budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai lokal yang dapat memberikan ruang publik untuk berpartisipasi dan akses dalam politik lokal yang bertumpu pada semangat egaliterian dalam kehidupan masyarakat madani. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi lebih merupakan hasil akhir dari interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomena sepanjang sejarah Indonesia, dimana telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan social dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas(Sahdan, 2004).

Realitas kemiskinan itu sangat memprihatinkan baik di perkotaan maupun di perdesaan yang disebabkan oleh berbagai faktor mikro maupun makro, internal maupun eksternal. Faktor sosial budaya ternyata juga tidak dapat dipisahkan dengan faktor ekonomi dalam belenggu kemiskinan, karena banyak kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat menghambat aktivitas ekonomi sehingga menyebabkan sulitnya masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan ini sangat diperlukan suatu proses pemberdayaan. Dengan pemberdayaan akan dapat membentuk suatu kekuatan yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri (Mubyarto,2005).

Kegiatan SPP merupakan salah satu jenis kegiatan yang secara nyata menunjukkan adanya keseriusan dari BK DAPM untuk memprioritas pemberdayaan perempuan. Secara umum kegiatan simpan pinjam perempuan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk simpan pinjam, yang semua anggotanya adalah perempuan. Mengapa kegiatannya dalam bentuk simpan pinjam? Mengapa anggotanya mesti kaum perempuan?

Dalam Konferensi Perempuan Sedunia I di Mexico City yang diselenggarakan pada tahun 1975 ditemukan adanya fenomena dimana status perempuan lebih rendah daripada laki-laki, baik sebagai pelaku maupun sebagai penikmat hasil pembangunan. Yang lebih mengejutkan, fenomena ini ternyata terjadi di semua negara, BKKBN (2005) dalam Marhaeni (2008). Marhaeni juga mengungkapkan bahwa, ketimpangan gender sampai saat ini masih terlihat di

seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Beranjak dari kenyataan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Grameen (Yunus, 2008) terhadap perilaku orang-orang yang mendapat pinjaman uang di Bangladesh, dapat diperoleh gambaran bahwa meminjamkan uang kepada perempuan ternyata bermanfaat lebih banyak kepada keluarga daripada jika uang tersebut dipinjamkan kepada laki-laki. Hal ini disebabkan karena cenderung menggunakan uang pinjaman itu untuk keperluan diri sendiri. Lain halnya jika uang itu uang pinjaman itu untuk keperluan diri sendiri. Pada umumnya perempuan akan menggunakan uang pinjaman sebagai investasi dalam membangun usaha yang bermanfaat bagi seluruh keluarga. Selanjutnya pendapatan dari usaha tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak terlebih dahulu, kemudian kebutuhan ayah atau suami dan yang terakhir barulah untuk memenuhi kebutuhan ibu atau istri itu sendiri. Dengan demikian, memberi pinjaman kepada perempuan pada umumnya akan menciptakan efek air terjun yang bermanfaat bagi seluruh keluarga dan juga akan bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan di Kabupaten Purworejo pada khususnya masih didominasi oleh perdesaan, dimana kemiskinan biasanya terjadi pada penduduk yang lebih bertumpu pada sector agraris daripada sector lainnya seperti industri, perdagangan maupun

pemerintahan. Hal inilah yang terjadi pada penduduk di perdesaan. Penyebab kemiskinan di perdesaan juga dikarenakan oleh rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan serta rendahnya kualitas infrastruktur lingkungan, yang semuanya saling berkaitan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban moral dan hukum bagi bangsa Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah telah dilakukan secara terus menerus dengan berbagai pendekatan dan program melalui kebutuhan dasar seperti : (1) Pangan, (2) Pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) Perluasan kesempatan kerja, (4) Bantuan sarana dan prasarana pertanian, (5) Bantuan kredit usaha bagi masyarakat miskin, (6) Bantuan prasarana pemukiman kumuh/sanitasi. Dari cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Disamping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri (Hureirah, 2005).

Pendekatan dan program pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bisa terlepas dari konteks pembangunan masyarakat, dimana pembangunan ini bertujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Pendekatan pembangunan hendaknya menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan bukan sebagai obyek pembangunan.

Pendekatan yang paling ideal dalam pembangunan adalah pendekatan yang bersifat *bottom up*, dimana lebih menonjolkan inisiatif, kreatifitas dan mengakomodasi kondisi wilayah, potensi dan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini menekankan upaya masyarakat untuk dapat mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Salah satu program dari Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (BK DAPM) Mandiri Perdesaan, yang mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dari masyarakat guna kesuksesan program-program pembangunan. Selain itu, keberadaan BK DAPM sendiri juga diharapkan mampu mengembangkan kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah, khususnya Kecamatan dan Desa. BK DAPM dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran kritis, pembelajaran, pengembangan kapasitas para pelaku pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat dan prakarsa pemerintah daerah dalam pengelolaan program, sehingga mampu mengembangkan BK DAPM sebagai salah satu model penanggulangan kemiskinan.

BK DAPM pelaksanaannya dimulai sejak Tahun 2007 sehingga selama perjalanannya semakin belajar dewasa dari pengalaman untuk melakukan transisi pengelolaan program pemberdayaan secara bertahap kepada Pemerintah Daerah, dimana BK DAPM merupakan salah satu upaya pemerintah

untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Sasaran program ini adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki peringkat atas dalam tingkat keparahan kemiskinan di Indonesia serta ditambahkan dengan pertimbangan lain sesuai kondisi aktual daerah. BK DAPM ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Visi BK DAPM adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di perdesaan. Mandiri diartikan (1) Kemampuan mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, (2) Mampu mengakses sumberdaya yang berasal dari luar lingkungannya, (3) Serta mampu mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di lingkungannya.

BK DAPM ini adalah penyempurnaan dan perluasan terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan terdahulu seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), untuk mendukung efektivitas realisasi prinsip-prinsip dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan. Disamping itu juga merupakan upaya pemerintah untuk mengharmonisasi program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Selama

ini program-program berjalan secara parsial dan sektoral dengan pendekatan dan prosedur yang beragam. Harmonisasi prinsip, kebijakan dan prosedur melalui BK DAPM diharapkan akan mengurangi inefisiensi dan inefektivitas pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat.

BK DAPM dapat menjadi salah satu program penanggulangan kemiskinan adalah fokus sasarannya pada rumah tangga miskin di perdesaan, dimana 70 % dari 237 juta penduduk di Indonesia berada di desa. Selain hal tersebut BK DAPM juga mempunyai keunggulan seperti : (1) Perencanaan yang partisipatif, (2) Pelaksanaan program yang partisipatif, (3) Transparansi dan akuntabel , (4) Desentralisasi anggaran di tingkat kecamatan, yang digalang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swadaya masyarakat.

Keberhasilan BK DAPM dapat dilihat antar lain dari tingkat efektivitas program dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Efektivitas program tercermin dari masing-masing tahap kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pelestarian.

Dalam pelaksanaannya jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) BK DAPM adalah kegiatan fisik maupun non fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pelatihan, pemberian pinjaman modal usaha produktif dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekitar. Untuk lingkup nasional BK DAPM telah berhasil menyediakan lapangan kerja dan sekaligus menambah penghasilan rumah tangga miskin. Disamping

berorientasi pada masyarakat miskin, BK DAPM juga memperhatikan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan menambah satu kegiatannya melalui kegiatan yang dikhususkan bagi kelompok perempuan.

Tujuannya adalah meningkatnya partisipasi kelompok perempuan kedalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan pembangunan. Harapannya memberi kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam setiap proses kegiatan dan menikmati secara adil dari manfaat pembangunan.

Untuk mengangkat kesetaraan gender, BK DAPM memberi bantuan modal usaha produktif bagi perempuan yang telah mempunyai usaha seperti industri kecil atau rumah tangga, pedagang kecil dan lain sebagainya yang tergabung dalam Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP). Adanya kegiatan simpan pinjam tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Bener untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan agar dapat keluar dari garis kemiskinan sehingga kehidupannya menjadi lebih sejahtera.

Berdasarkan wawancara pendahuluan, diketahui belum ada evaluasi yang bersifat ilmiah dari Program BK DAPM ini, khususnya Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Bener, padahal sebuah evaluasi itu sangatlah penting dilakukan terhadap suatu program, terlebih program tersebut merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya perempuan. Dengan adanya sebuah evaluasi akan dapat diketahui apakah program tersebut sudah

dapat memenuhi tujuannya atau belum. Berdasarkan evaluasi, juga akan diketahui kekurangan atau kelemahan-kelemahan dari sebuah program, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuat perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Berangkat dari fenomena ini, diteliti bagaimanakah efektivitas pelaksanaan BK DAPM Perdesaan, khususnya Program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa sejahtera merupakan dambaan bagi setiap kehidupan manusia terlebih bagi kehidupan masyarakat miskin, sehingga salah satu program yang dianggap paling cocok untuk menanggulangi kemiskinan khususnya di perdesaan adalah BK DAPM. Maka dari itu yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh efektivitas pelaksanaan program Simpan Pinjam kelompok Perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di perdesaan khususnya di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari rumusan masalah tersebut dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Jumlah pinjaman, jumlah, jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, dan pengalaman mengikuti pelatihan terhadap komitmen pengembalian dana dan efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari BK DAPM di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo masih rendah

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ada pengaruh langsung jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha dan pengalaman mengikuti pelatihan terhadap komitmen pengembalian dana dan efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari BK DAPM di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis pengaruh langsung jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha dan pengalaman mengikuti pelatihan terhadap komitmen pengembalian dana dan efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari BK DAPM Pedesaan di Kecamatan Bener.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberi gambaran yang jelas mengenai efektivitas BK DAPM melalui kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga secara praktis dapat dirumuskan langkah-langkah pengembangannya.

2. Memberikan informasi pengaruh langsung jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupan terhadap komitmen pengembalian dana dan efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari BK DAPM.
3. Memberikan informasi yang berguna bagi pelaksana, pengelola dan pembina program penanggulangan kemiskinan.
4. Sebagai masukan pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan program pengentasan kemiskinan.
5. Sebagai masukan bagi peneliti lain dalam menelaah kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan.

STIE Widyia Wiwaha  
Jangan Plagiat

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri, atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga masyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut (Bahua, 2008).

Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi pandang :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai pemberian bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik, maupun sosial serta pengembangan kelembagaan di daerah;
3. Melindungi melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas akan dapat terwujud dengan baik jika semua yang terlibat di dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut juga ditingkatkan pula keberdayaannya. Diantara yang punya peran besar dalam upaya pemberdayaan ini adalah lembaga atau organisasi sebagai wadah kegiatan masyarakat beserta pengelolanya, serta fasilitator sebagai penggerak utama upaya pemberdayaan tersebut.

#### **2.1.2 Badan Kerjasama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (BK DAPM)**

BK DAPM adalah salah satu program untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, yang dalam kegiatannya sangat bemuansa partisipatif dan sangat strategis, sehingga menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam mengatasi kemiskinannya sendiri. Bahkan dalam kerangka ini, pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator saja, sedangkan faktor dominan yang berperan dalam rangkaian proses tersebut adalah pihak swasta, dalam hal ini konsultan dengan seluruh jajarannya. Pendekatan BK DAPM merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi BK DAPM adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Adapun Misinya adalah : (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, (2) pelembagaan system pembangunan partisipatif, (3) pengefektivan fungsi dan peran pemerintah local, (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana social dasar dan ekonomi masyarakat, (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi BK DAPM, strategi yang dikembangkan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan system pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa (BKAD). Berdasarkan visi, misi dan strategi yang dikembangkan, BK DAPM lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui BK DAPM diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran yang telah dilakukan melalui PPK.

Secara umum tujuan digulirkannya BK DAPM ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan tersebut di atas dijabarkan lagi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
- g. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Dalam pengelolaan program BK DAPM senantiasa menggunakan prinsip-prinsip sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam implementasi rangkaian kegiatan program, diantaranya meliputi :

Bertumpu pada pembangunan manusia, diartikan bahwa masyarakat hendaknya lebih memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.

- a. Otonomi, diartikan masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa intervensi negative dari luar.
- b. Desentralisasi, diartikan memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- c. Berorientasi pada masyarakat miskin, diartikan segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- d. Partisipasi, diartikan masyarakat berperan secara aktif dalam proses tahapan program dan pengawasannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan.
- e. Kesetaraan dan keadilan gender, diartikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat pembangunan, serta sejajar kedudukan pada saat konflik.
- f. Demokratis, diartikan masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- g. Transparansi dan akuntabel, diartikan masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka

dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrative.

- h. Prioritas, diartikan dalam memilih kegiatan yang utama dengan pertimbangan kemendesakkan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
- i. Keberlanjutan, diartikan setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan system pelestariannya.

Adapun sasaran utama BK DAPM adalah (1) rumah tangga miskin di perdesaan, (2) kelembagaan masyarakat di perdesaan dan (3) kelembagaan pemerintahan lokal.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, pada intinya BK DAPM ini menyertakan masyarakat secara langsung dalam pengentasan kemiskinan. Rakyat desa penerima program diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat mendukung kegiatan usahanya. Untuk kebutuhan ini, mereka memanfaatkan institusi lokal yang telah ada seperti kelompok pengajian, PKK desa, paguyuban ibu-ibu RT, kelompok Posyandu dll, untuk dijadikan sasaran pemanfaat bagi kegiatan usaha simpan pinjam.

Untuk mendukung proses dan mekanismenya, di tingkat kecamatan terdapat PJOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan) yang bertugas melakukan pembinaan atas kegiatan BK DAPM di wilayah kecamatan. Disamping itu masih ada Fasilitator Kecamatan

dari perusahaan swasta murni yang bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, utamanya dari aspek prosedural dan administrasi keuangan.

BK DAPM Perdesaan adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Visi dari BK DAPM Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi BK DAPM Perdesaan adalah :

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.

## **2.2 Pendapatan**

Pendapatan adalah jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti (sewa, bunga dan deviden) serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan social atau asuransi pengangguran (Samuelsen dan Nourdhaus, 1997).

Menurut Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia, pola pendapatan rumah tangga terdiri dari upah dan gaji, keuntungan usaha rumah tangga yang tidak berbadan hukum dan penerimaan transfer (Aziz, 2005).

### **2.3 Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2002), efektivitas adalah merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Didalam penulisan ini efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

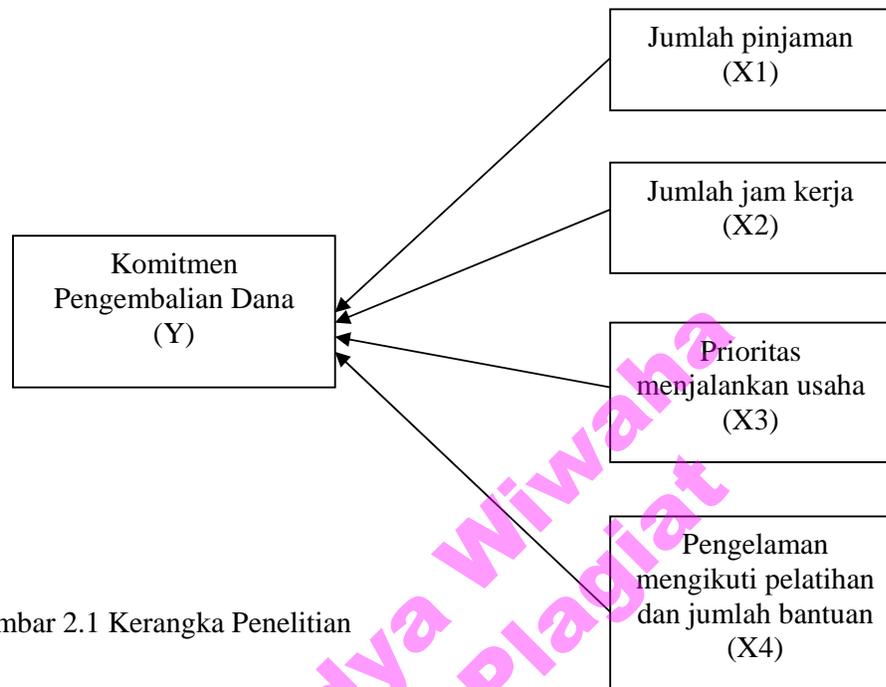
Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005:109). Suatu organisasi secara keseluruhannya dalam kaitannya dengan efektivitas adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau bekerja efektif dalam mencapai tujuannya, maka kelompok dimana ia menjadi anggota juga efektif dalam mencapai tujuan, organisasi itu juga efektif mencapai tujuan. Efektivitas berbeda dengan efesiensi. Efesiensi adalah pengorbanan untuk mencapai tujuan. Dimana semakin kecil pengorbanannya dalam mencapai tujuan, maka dikatakan semakin efesiensi. Sedangkan Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai (Sigit, 2003).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian dan kajian yang mengupas permasalahan kemiskinan serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin terutama yang berada di perdesaan, antara lain :

Mubyarto (1999), melakukan penyuntingan kajian program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang menyimpulkan bahwa program IDT dapat dirasakan secara langsung oleh penduduk desa dengan keberhasilan antara lain : 1) Dapat menurunkan jumlah penduduk miskin berkisar antara 16 sampai 23 %, 2) Meningkatkan modal kelompok masyarakat, 3) Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat. Adapun manfaat yang tidak langsung yaitu 1) Membaiknya keadaan keuangan rumah tangga, 2) Peralihan pola usaha petani dari subsisten ke tahap komersial, 3) Terbentuknya lembaga keuangan perdesaan, 4) Semakin mantapnya keberadaan kelompok masyarakat.

## 2.5 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada tinjauan pustaka, kerangka teori dan kerangka penelitian maka di susun hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga ada pengaruh antara langsung jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha dan pengalaman mengikuti pelatihan terhadap komitmen pengembalian dana dan efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari BK DAPM Pedesaan di Kecamatan Bener.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah korelasi analitik yang bertujuan meneliti sejauh mana variasi pengaruh suatu faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lainnya. Rancangan analitik ini juga mempermudah penelusuran dan pengukuran antara variabel bebas dengan variabel terikat, berdasarkan anggapan bahwa temuan-temuan sampel dapat digeneralisasikan ke populasi penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, rancangan penelitian berbentuk *explanatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya (Bungin, 2010).

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian tentang analisis kebijakan pemberian bantuan pinjaman modal usaha kegiatan Simpan Pinjam Perempuan BK DAPM perdesaan dilakukan di Kecamatan Bener karena wilayah ini merupakan wilayah wisata di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan potensi sumber daya yang sangat besar untuk dikembangkan melalui kebijakan pemberian berbagai program yang bermanfaat untuk memberdayakan potensi yang dimiliki termasuk pemberdayaan masyarakat miskin salah satunya adalah BK DAPM perdesaan melalui kegiatan Simpan

Pinjam Perempuan (SPP) berupa pinjaman modal bagi kelompok usaha kecil terutama untuk penduduk perempuannya.

### 3.3 Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu sifat yang dapat memiliki bermacam nilai atau sesuatu yang bervariasi (Kerlinger, 2006). Mendasari kerangka pemikiran dan tujuan studi dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu variabel yaitu bebas dan variable terikat. Deskripsi merupakan gambaran dari rancangan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara jenis usaha, jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan pengalaman dalam mengelola bantuan terhadap efektivitas keberlangsungan dana dalam pemberian pinjaman modal usaha. Berdasarkan pokok permasalahan dan hipotesis yang diteliti, maka variabel yang dianalisis dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang mengalami perubahan akibat pengaruh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Pengembalian Dana (Y).
2. Variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas adalah, jumlah pinjaman (X1), jumlah jam kerja (X2), prioritas usaha (X3), pengalaman mengikuti pelatihan dan pengalaman mengelola bantuan (X4).

### 3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Berdasarkan identifikasi terhadap variabel-variabel yang digunakan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel yang diteliti, berikut ini dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel.

1. Pengembalian Dana (Y). Diukur melalui penilaian pada efektivitas kebijakan yaitu persentase total pengembalian pinjaman dan bunga sampai tahun tertentu dibagi persentase pinjaman yang disalurkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keberlangsungan modal usaha dengan variabel-variabel sebagai berikut:
  - a. Jumlah pinjaman (X1). Dalam penelitian ini jumlah pinjaman yang diberikan oleh BK DAPM perdesaan kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) selama periode 24 bulan yang diukur dalam satuan rupiah.
  - b. Jumlah jam kerja perhari (X2). Jumlah jam kerja adalah yaitu jumlah jam kerja perhari yang diukur dalam satuan jam selama satu hari dalam melakukan usahanya.
  - c. Prioritas usaha yang dijalankan (X3). Prioritas usaha yang dijalankan dibedakan antara pilihan usaha utama dan usaha sampingan. Usaha utama jika responden tidak memiliki pekerjaan lain sedangkan usaha

sampingan jika masih memiliki usaha lain yang diukur dalam satuan usaha.

- d. Pengalaman mengikuti pelatihan dan Jumlah mengelola bantuan serupa (X4). Pengalaman mengikuti pelatihan dinyatakan dengan jawaban pernah atau tidak pernah dari responden dalam menjalankan usaha selama periode pemberian dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam jangka waktu 24 bulan yang diukur dalam satuan bulan. Jumlah bantuan serupa selain melalui pinjaman modal melalui simpan pinjam perempuan.

### 3. Komitmen

Pengembalian Dana (Y1). Komitmen Pengembalian dana tepat waktu dinyatakan dengan waktu pengembalian pinjaman < 5 bulan dinotasikan 5, 5 bulan – 9 bulan dinotasikan 4, 10 bulan – 14 bulan dinotasikan 3, waktu pengembalian pinjaman antara 15 bulan – 19 bulan dinotasikan 2, sedangkan waktu pengembalian pinjaman antara 20 bulan – 24 bulan dinotasikan 1.

## 3.5 Jenis dan Sumber Data

### 3.5.1 Jenis data

Jenis data menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

#### a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka dan dapat dihitung dengan satuan hitung (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini diperoleh data kuantitatif, yakni data yang dapat diukur dengan angka. Data yang

dimaksud adalah data yang diperoleh dari laporan BK DAPM dalam angka tahun 2018 mengenai jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, jumlah desa di kecamatan Bener kabupaten Purworejo, serta data alokasi pemberian pinjaman modal usaha kegiatan ekonomi melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan BK DAPM perdesaan di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dalam laporan bulanan fasilitator Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

- b. Data kualitatif juga diperoleh dalam penelitian ini. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam angka, tetapi berupa informasi dalam bentuk keterangan dan hasil kuesioner seperti tingkat pemerataan dan kesederhanaan prosedur, efektivitas keberlangsungan dana serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keberlangsungan dana dalam pemberian pinjaman modal usaha melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kuesioner yang digunakan berupa kuisisioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1998).

### **3.5.2 Sumber data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, dicatat dan diamati untuk pertama kalinya dan hasilnya digunakan langsung untuk memecahkan permasalahan yang dicari jawabannya (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu dari kelompok masyarakat yang menerima

bantuan pinjaman modal usaha kegiatan ekonomi melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada kelompok penerima pinjaman modal usaha terkait dengan tingkat pemerataan dan kesederhanaan prosedur pemberian pinjaman, efektivitas keberlangsungan dana dalam pemberian pinjaman serta pengaruh jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupa terhadap efektivitas keberlangsungan dana dalam pemberian pinjaman.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, dikumpulkan dan diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam bentuk text book dan jurnal (Sugiyono, 2008). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, catatan-catatan, ataupun tulisan-tulisan yang sudah diolah sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penulisan. Data yang dimaksudkan tersebut diperoleh dari instansi terkait, seperti Bappeda, BPS Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Pemerintah Kecamatan Bener, BPS Kecamatan Bener dan Unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Data tersebut adalah data tentang jumlah desa, jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kecamatan Bener tahun 2018, data lokasi dan alokasi dana untuk modal

usaha SPP tahun 2018 Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, dan data tentang total pengembalian pinjaman untuk modal usaha dan bunga serta total pinjaman untuk modal usaha yang disalurkan tahun 2018 Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

### **3.6 Populasi, Sampel dan Metode Penentuan Sampel**

#### **3.6.1 Populasi penelitian**

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen (unit dan individu) sejenis dan dapat dibedakan berdasarkan objek penelitian (Nata Wirawan, 2002). Dalam metode penelitian kata populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan (Universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dengan jumlah kelompok adalah 225 kelompok.

#### **3.6.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Dalam penentuan sampel ini, jumlah sampel yang akan digunakan sebagai responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan jumlah populasi di daerah penelitian. Sampel

yang mewakili populasi akan tetap menggambarkan keadaan sebenarnya dari populasi. Menurut Nata Wirawan (2002), sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki. Sampel dalam penelitian ini adalah ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dengan jumlah 144 ketua kelompok.

### 3.6.3 Metode penentuan sampel

Dalam hal ini metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik *accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bila dipandang cocok sebagai sumber data. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan Slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Nilai Kritis (batas ketelitian)

Jumlah populasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo adalah 225 kelompok, dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5 persen, maka jumlah sampel yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{222}{1+222,002}$$

$$n = \frac{222}{1+0,8604}$$

$$n = 144$$

Berdasarkan rumus Slovin tersebut diperoleh sampel sebanyak 144 sampel ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 144 sampel ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang memiliki usaha dan menerima bantuan pinjaman modal usaha dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) BK DAPM perdesaan tahun 2018.

### 3.7 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner sebagai sarana pengumpulan data sehingga bermanfaat untuk mengumpulkan data yang sifatnya pribadi dari responden (Sugiono, 2008). Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode berikut :

1. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara atau tatap muka langsung antara penanya atau peneliti dengan sumber data atau responden. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam.

2. Observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung secara langsung terhadap kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati dan dimana tempatnya.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

#### **3.8.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sample dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2008). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata, standar deviasi, dan menganalisis tingkat pemerataan serta melakukan perhitungan untuk mencari persentase efektivitas keberlangsungan usaha.

### 3.8.2 Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2001), uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang lebih handal untuk menguji normalitas data adalah dengan melihat *normal probability plot*. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

#### b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2001), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Faktor*). Berdasarkan nilai *tolerance*, nilai yang terbentuk harus di atas 0,10 (10%) dan berdasarkan nilai VIF nilai yang terbentuk harus kurang dari 10, bila tidak maka akan terjadi multikolinearitas dan model regresi tidak layak untuk digunakan.

#### c. Uji Autokorelasi (Interdependensi)

Menurut Ghozali (2001), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Waston (Uji Dw) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas ( $d_u$ ) dan  $(4-d_u)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah ( $d_l$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- 3) Bila nilai DW lebih besar daripada  $(4-d_l)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- 4) Bila nilai DW terletak di antara batas atas ( $d_u$ ) dan batas bawah ( $d_l$ ) atau DW terletak antara  $(4-d_u)$  dan  $(4-d_l)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

### 3.8.3 Uji F dan Uji t

Guna membuktikan apakah hipotesis yang diajukan didukung oleh data atau tidak, maka diperlukan adanya pengujian hipotesa dengan alat-alat statistik guna mengukur antara variabel yang dinyatakan dalam hipotesa. Alat statistik

yang dipergunakan adalah analisa regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara bersama-sama.

Dalam penelitian ini persamaan regresi gandanya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan :

Y : Variabel terikat/tergantung

X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub> : Variabel Bebas

a : Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> : Koefisien regresi

Untuk melakukan uji hipotesis digunakan uji yaitu:

a. Uji F

Uji F digunakan untuk melakukan uji hipotesis 3. Rumus yang digunakan adalah :

$$F_{hitung} = \frac{Jk(\text{regresi}) / k}{Jk(\text{standar error}) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

k = variabel penelitian

n = jumlah data

Kriteria yang digunakan untuk melakukan uji F :

- 1) Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka Ho ditolak, artinya koefisien b dalam persamaan regresi linier berganda adalah tidak sama dengan nol, sehingga persamaan garis regresi linier tersebut adalah benar/ diterima.

- 2) Jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka  $H_0$  diterima, artinya koefisien b dalam persamaan regresi linier berganda adalah sama dengan nol, sehingga persamaan garis regresi linier tersebut adalah tidak diterima/ditolak. Atau dapat dikatakan bahwa variabel X tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk melakukan uji hipotesis 1 dan 2. Rumus yang digunakan adalah:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Dengan taraf signifikansi 5 % dan derajat bebas  $n - 1$ , maka kriteria penolakan untuk uji t adalah:  $H_0$  diterima apabila:  $t \text{ tabel} \geq t \text{ hitung} \geq -t \text{ tabel}$ , berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.  $H_0$  ditolak apabila:  $t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung}$  atau  $\Sigma - t \text{ tabel} < -t \text{ tabel}$ , berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi. Metodologi, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi .
- Bahua, M. I. 2008. Kinerja Penyuluhan Pertanian. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bungin, Burhan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hureirah, A. 2005. Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Bandung: Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS-LSM Mata Air (Masyarakat Cinta Tanah Air), Bandung.
- Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Marhaeni. 2008. Ilmu Komunikasi Teori & Praktik. Yogyakarta : Graha.
- Mubyarto. 2005. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES.
- Nata Wirawan. 2002. Statistik, Edisi Kedua. Denpasar: Penerbit Keraras Emas.
- Pengantar: Robert MZ. Lawang. Depok: Marjin Kiri.
- Sigit. 2003. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: BPFE UST.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Yunus, Muhammad dan Jolis, Alan. 2008. Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan. Terjemahan: Irfan Nasution,